

Pengaruh Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penegakkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik (Sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau).

Taufeni Taufik

**Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : pengaruh auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD secara simultan dan parsial terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik pada kabupaten/kota di Provinsi Riau baik secara simultan dan parsial pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dengan metode sensus, dengan jumlah responden 110 orang yang terdiri dari 50 auditor internal, 30 auditor eksternal, dan 30 anggota DPRD di kabupaten/kota di Provinsi Riau. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa jalur. Berdasarkan hasil penelitian ditemukann auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintah secara simultan dan parsial

Key Word : Auditor internal, auditor eksternal, DPRD, tata kelola pemerintah daerah yang baik

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa Indonesia belum melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik, di antaranya penelitian yang telah dilakukan oleh Jeff Hunter dan Anwar Shah, (1998) menyatakan Indonesia dikategorikan sebagai negara yang kualitas rendah, sejajar dengan Cina, Nepal dan Pakistan. Booz-Allen and Hamilton (2000), menyatakan Indonesia menduduki posisi di ranking yang paling jelek dengan besaran indeks efisiensi peradilan 2,50, indeks korupsi 2,15, dan indeks *good governance* 2,88. dan *Transparency International* (TI) (2006) menyatakan bahwa Indonesia masuk negara yang terkorup dengan indeks di bawah 3,00. Sementara itu temuan (KPK) (2006) menyatakan bahwa sekitar 1.000 anggota dewan telah menggerogoti uang rakyat yang bukan haknya. Jumlah itu meliputi 700 wakil rakyat di kabupaten/kota, 300 anggota dewan di tingkat provinsi. Kemudian (ICW) (2007) menyatakan tahun 2006 terungkap 166 kasus, dengan kerugian negara sebesar Rp 14,4 triliun.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Riau semester 1 dan 2 tahun anggaran 2006 ditemukan jumlah kasus sebanyak 461. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Riau Juli 2007 menemukan sistem pengendalian intern (SPI) masih lemah, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dipatuhi. Sedangkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Provinsi Riau tahun 2007 menemukan 360 penyimpangan anggaran pembangunan di 22 SKPD, dengan rincian 178 temuan penyimpangan di satuan kerja Pemerintah Provinsi Riau, dan 182 temuan di 11 kabupaten/kota. Untuk itu badan pengawas Provinsi Riau telah mengeluarkan 205 saran untuk 22 SKPD di

Pengaruh Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penegakkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik (Taufeni Taufik)

Pemprov. Riau dan 212 saran untuk kabupaten/kota. Dari seluruh saran yang disampaikan, sebanyak 133 saran belum dilaksanakan.

Gambaran di atas memberikan indikasi pada kita bahwa penegakan *good governance* merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dengan tujuan supaya tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimade* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN dengan memperkuat auditor internal, auditor eksternal, DPRD.

Dalam rangka pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara telah diterbitkan peraturan pemerintah PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan BPK Nomor 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara harus melaksanakan tugasnya untuk dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan. Rekomendasi perbaikan yang disampaikan BPK kepada pemerintah untuk mendorong pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka diajukan judul penelitian :“ Pengaruh auditor internal, Auditor Eksternal, dan DPRD dalam Penegakkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik (*Sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau*).

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan : Apakah auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap penegakan tata kelola pemerintah daerah yang baik pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sedangkan tujuan yang diharapkan dari penelitian adalah untuk mencari bukti empiris mengenai pengaruh auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD dalam penegakan tata kelola pemerintah daerah yang baik pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : pengaruh auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD secara simultan dan parsial terhadap penegakan tata kelola pemerintah daerah yang baik pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh ; para peneliti dengan harapan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik. Serta bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi internal auditor, eksternal auditor, dan DPRD dalam melakukan pengawasan secara bersama-sama dan proaktif dalam penegakan tata kelola pemerintah daerah yang baik.

KAJIAN TEORITIS DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Konsep dasar dari penelitian ini, berasal dari konsep *New Publik Management (NPM)* salah satunya adalah *reinventing government* yang dipublikasikan oleh Osborne dan Gaebler (1992), di mana konsep ini menuntut reformasi pemerintah dengan mengadopsi tata cara perusahaan dengan harapan terjadi efisiensi, pemangkasan biaya. Konsep Osborne dan Gaebler tersebut, sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara. Dalam UU.Nomor 1 tahun 2004, dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama ini menggunakan pendekatan superioritas, membuat aparaturnya pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu perlu pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*good governance*).

Karakteristik *good governance* menurut UNDP (LAN-BPKP, 2000), yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*. Untuk sektor publik yang paling penting : *accountability, participation, dan transparency*. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah (UU. Nomor 1 tahun 2004). Standar akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan LKPD adalah standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 tahun 2005. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 dinyatakan pemeriksaan keuangan negara dapat dilakukan oleh BPK. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPRD, DPD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang (Pasal 23 E ayat 2 dan 3, Undang-Undang RI. Tahun 1945).

Penelitian yang dilakukan untuk melihat hubungan auditor internal dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Di antaranya dilakukan oleh Cheung, Tang chi, Qiang Chen (1997) hasil temuan audit internal akan meningkatkan tata kelola perusahaan. Kemudian H.A.Rodi Kartamulja, (2005), menemukan audit internal berpengaruh secara parsial terhadap *good corporate governance*. Seterusnya Jenny Goodwin-Stewart, Pamela Kent (2006), menunjukkan terdapat dukungan yang kecil antara audit internal dengan *corporate governance*. E.Ristandi Suhardjadinata, (2006), menemukan peran jasa pemeriksa internal berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintah. Kemudian (Efrizal Syofyan, 2006), menemukan peran auditor internal berpengaruh kecil langsung terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Sedangkan (Gusnardi, 2008), menemukan pengaruh internal audit secara positif dan lemah terhadap *good corporate governance*.

Penelitian yang melihat hubungan auditor eksternal dan *good governance*, telah pernah dilakukan oleh : Jenny Goodwin, Jean Lin seow (2002), hasil penelitian menunjukkan, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel yang diteliti. Sementara itu penelitian (Gandhi, 2003) menyatakan bahwa pengaruh pemeriksaan intern sangat dominan dalam memeriksa akuntabilitas keuangan departemen. Sementara itu melihat hubungan keterkaitan antara auditor eksternal dan DPRD, penelitian telah dilakukan oleh ; Urbancic, Frank R. (1991), tentang *Auditor communications with Boards of Director*. Hasil temuannya menyatakan komunikasi auditor internal meningkatkan independensi dari fungsi internal audit.

Hipotesis penelitian adalah Pengaruh Auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD terhadap penegakan tata kelola pemerintah yang baik secara simultan maupun parsial pada kabupaten/kota di Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory survey* yaitu penelitian dengan menggunakan populasi untuk menjelaskan hubungan antar variabel pada populasi tersebut.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

1). Auditor internal (X_1)

Auditor internal “ *are employed by individual companies to audit for management much as the GAO does for congress* (Arens, et al, 2008). Sub variabel auditor internal adalah kode etik dan standar profesi auditor internal. Supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya auditor internal memerlukan kode etik dan standar profesi auditor internal yang seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit internal, serta merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya (*The Institut of Auditor Internals*, 2004).

2). Auditor Eksternal (X_2)

Auditor eksternal adalah auditor independen yang berasal dari luar organisasi. Auditor eksternal dalam penelitian ini adalah auditor pemerintah yaitu BPK. Sub variabel dari variabel auditor eksternal adalah kode etik dan metode pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

3). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (X_3)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. (UU-RI. No. 17 tahun 2003, Pasal 1 ayat 4). Sub variabel variabel DPRD adalah adalah kode etik dan fungsi DPRD.

4). Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik (Y)

Good governance is therefore a subset of governance, wherein public resources and problems are managed effectively, efficiently and in response to critical needs of society. Effective democratic forms of governance rely on public participation, accountability and transparency (UNIFEM, 2005). Sub variabel variabel tata kelola pemerintah yang baik adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Untuk melakukan pengukuran variabel X dan Y digunakan kuesioner yang dinilai dengan menggunakan skala Likert. Dalam penilaian ini, angka penilaian disesuaikan dengan item kuesioner yang disusun, di mana setiap alternatif jawaban akan diberikan bobot yang berbeda.

Sumber dan Cara Penentuan Data.

Penelitian ini menggunakan teknik sensus atas seluruh kabupaten/kota yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II dan 1 tahun anggaran 2006 dan tahun anggaran 2007 yang berjumlah 10 entitas. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Bawasprov dan Bawasda sebagai auditor internal, (BPK) sebagai auditor eksternal, dan DPRD yang berada di kab/kota di Provinsi Riau. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jawaban 110 responden. Kuesioner diberikan 5 orang yang terdiri dari ketua dan

anggota tim pemeriksa Bawasprov dan Bawasda sebagai auditor internal serta kepada 3 Orang ketua dan anggota BPK sebagai auditor eksternal serta kepada 3 orang anggota DPRD dari panitia anggaran, yang berada di kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengajukan kuesioner kepada responden, serta melakukan teknik dokumentasi, dengan cara memanfaatkan sejumlah dokumen tertulis berupa laporan dan literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

Untuk menguji kesahihan dan keandalan data yang digunakan dalam penelitian Metode Pengujian Data, dilakukan pengujian : 1) Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *Rank Spearman*. Dengan tingkat keyakinan 95 % (alfa = 0,05). Signifikansi koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya, dan apabila koefisien korelasinya > 0,30 (Kaplan-Saccuzza; 1993) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. 2) Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang valid, dengan menggunakan rumus *Spearman-Brownl*. Dengan tingkat keyakinan 95 % (alfa = 0,05), jika : $r_{tot} > r_{tabel}$, berarti data yang bersangkutan *reliable* dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis dan $r_{tot} < r_{tabel}$, berarti data yang bersangkutan tidak *reliable* dan tidak layak digunakan dalam pengujian hipotesis.

Mengingat data variabel-variabel penelitian yang diperoleh melalui kuesioner merupakan data dengan skala ordinal, maka agar dapat dianalisis secara statistik data tersebut harus dinaikkan skalanya menjadi interval dengan menggunakan *Method of successive Interval* (MSI) (Nirwana SK Sitepu, 1994). Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis jalur (*Path Analysis*) dengan bantuan *Software Lisrel Versi 8.54*.

Pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh variabel X_1, X_2, X_3 , terhadap variabel Y. Tanda koefisien jalur yang diharapkan ρ_{YX_1} adalah positif artinya (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap (Y). Demikian halnya dengan tanda koefisien jalur yang diharapkan untuk ρ_{YX_2} adalah positif, di mana variabel (X_2) memiliki pengaruh terhadap (Y). Tanda koefisien jalur yang diharapkan ρ_{YX_3} adalah positif, di mana variabel (X_3) memiliki pengaruh positif terhadap (Y), artinya jika peran DPRD baik maka tata kelola pemerintah akan semakin baik.

Besarnya pengaruh variabel auditor internal, auditor eksternal dan DPRD terhadap tata kelola pemerintah yang baik dapat dinyatakan dengan rinci sebagai berikut :

- 1) Tata kelola pemerintah daerah yang baik (Y) dipengaruhi oleh auditor internal (X_1).

Pengaruh langsung dari (X_1) ke Y	$\rho_{YX_1} \cdot \rho_{YX_1} = (\rho_{YX_1})^2$
Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X_2)	$\rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_1 X_2} \cdot \rho_{YX_2}$
Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X_3)	$\rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_1 X_3} \cdot \rho_{YX_3}$
Total Pengaruh variabel (X_1) terhadap Y	$\rho_{11} + \rho_{12} + \rho_{13} = \rho_1$

Pengaruh Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penegakkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik (Taufeni Taufik)

di mana : $\rho_{11} = (\rho_{YX_1})^2$, $\rho_{12} = \rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_1 X_2} \cdot \rho_{YX_2}$, $\rho_{13} = \rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_1 X_3} \cdot \rho_{YX_3}$,
 $\rho_1 =$ Total pengaruh variabel (X_1) terhadap Y.

2). Tata kelola pemerintah daerah yang baik (Y) dipengaruhi oleh auditor eksternal (X_2).

Pengaruh langsung dari (X_2) ke Y	$\rho_{YX_2} \cdot \rho_{YX_2} = (\rho_{YX_2})^2$
Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X_1)	$\rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_1 X_2} \cdot \rho_{YX_2}$
Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X_3)	$\rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_2 X_3} \cdot \rho_{YX_3}$
Total Pengaruh variabel (X_2) terhadap Y	$\rho_{21} + \rho_{22} + \rho_{23} = \rho_2$

di mana : $\rho_{21} = (\rho_{YX_2})^2$, $\rho_{22} = \rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_1 X_2} \cdot \rho_{YX_2}$, $\rho_{23} = \rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_2 X_3} \cdot \rho_{YX_3}$,
 $\rho_2 =$ Total pengaruh variabel (X_2) terhadap Y.

3) Tata kelola pemerintah daerah yang baik (Y) dipengaruhi oleh DPRD

Pengaruh langsung dari (X_3) ke Y	$\rho_{YX_3} \cdot \rho_{YX_3} = (\rho_{YX_3})^2$
Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X_1)	$\rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_1 X_3} \cdot \rho_{YX_3}$
Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X_2)	$\rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_2 X_3} \cdot \rho_{YX_3}$
Total Pengaruh variabel (X_3) terhadap Y	$\rho_{31} + \rho_{32} + \rho_{33} = \rho_3$

di mana : $\rho_{31} = \rho_{YX_3} \cdot \rho_{YX_3} = (\rho_{YX_3})^2$, $\rho_{32} = \rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_1 X_3} \cdot \rho_{YX_3}$,
 $\rho_{33} = \rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_2 X_3} \cdot \rho_{YX_3}$, $\rho_3 =$ Total pengaruh variabel (X_3) terhadap Y. Total (X_1),
(X_2) dan (X_3) terhadap (Y) adalah : $R^2_{YX_1 X_2 X_3} = \rho_1 + \rho_2 + \rho_3$

di mana : $\rho_1 =$ Total pengaruh X_1 terhadap Y, $\rho_2 =$ Total pengaruh X_2 terhadap Y, $\rho_3 =$ Total pengaruh X_3 terhadap Y. Total pengaruh variabel lain diluar penelitian adalah $\rho_y \varepsilon_1$ dimana $\rho_y \varepsilon_1 = \sqrt{1 - R^2_{YX_1 X_2 X_3}}$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Auditor Internal, Auditor Eksternal dan DPRD secara Simultan dan Parsial Terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik

Untuk menguji hipotesis dihitung berapa nilai koefisien korelasi dan koefisien jalur antar variabel (X_1), (X_2) (X_3) secara parsial terhadap (Y). Dari hasil koefisien jalur dapat dibentuk persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y = 0.4990 \cdot X_1 + 0.3753 \cdot X_2 + 0.1931 \cdot X_3, \text{ Errorvar.} = 0.2317, R_y = 0.7683$$

(0.2354)	(0.2518)	(0.2265)	(0.1338)
2.1195	1.4906	0.8526	1.7321

Dari hasil perhitungan diketahui adanya pengaruh positif dari auditor internal, auditor eksternal dan DPRD terhadap tata kelola pemerintah yang baik secara simultan dan parsial. Dari persamaan struktural diperoleh koefisien jalur untuk pengaruh auditor internal terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik (P_{yx1}) bertanda positif dengan nilai sebesar 0,4990, koefisien jalur untuk pengaruh Auditor eksternal terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik (P_{yx2}) bertanda positif dengan nilai sebesar 0,3753 dan koefisien jalur untuk pengaruh DPRD terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik (P_{yx3}) bertanda positif dengan nilai sebesar 0,1931.

Pengaruh Auditor Internal, Auditor Eksternal dan DPRD secara Simultan terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik

Besarnya pengaruh auditor internal, auditor eksternal dan DPRD terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik ditunjukkan dengan nilai *R-square* (R^2) hasil perhitungan model sebesar 0,7683. Dari hasil perhitungan ditemukan pengaruh langsung auditor internal terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik sebesar 24,90 persen dan pengaruh langsung auditor eksternal 14,08 persen, serta pengaruh langsung DPRD 3,73 persen. Dengan total pengaruh langsung variabel auditor internal, eksternal auditor dan DPRD terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik sebesar 42,71 persen.

Tabel 1
Pengaruh Auditor Internal (X_1), Auditor Eksternal(X_2) dan DPRD (X_3) Secara Simultan Terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik (Y)

NO	Pengaruh	Besar Pengaruh
1	Pengaruh Langsung : X_1 terhadap Y X_2 terhadap Y X_3 terhadap Y Total Pengaruh Langsung	24.90 % 14,08% 3,73% 42.71%
2	Pengaruh tidak langsung Melalui X_1 dan X_2 Melalui X_1 dan X_3 Melalui X_2 dan X_3 Total pengaruh tidak langsung	13.54 % 13.64 % 6.93 % 34,12 %
3	Total pengaruh $X_1, X_2,$ dan X_3 terhadap Y	76,83 %

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah)

Sedangkan besar pengaruh tidak langsung melalui auditor internal dengan auditor eksternal sebesar 13,54 persen, melalui auditor internal dengan DPRD 13,64 persen dan melalui auditor eksternal dengan DPRD sebesar 6,93 persen. Dengan demikian ditemukan total pengaruh tidak langsung melalui variabel auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik 34,12 persen. Dalam penelitian ini ditemukan besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung variabel auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD secara simultan terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik sebesar 76,83 persen. sedangkan besarnya faktor lain yang mempengaruhi adalah 100 persen - 76,83 persen = 23,17 persen.

Pengaruh Auditor Internal Secara Parsial Terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik

Hasil yang diperoleh menunjukkan pengaruh langsung variabel auditor internal terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik sebesar 24,90 persen. Pengaruh tidak langsung melalui variabel auditor eksternal sebesar 10,12 persen dan melalui variabel DPRD sebesar 3,42 persen. Dari hasil perhitungan ditemukan pengaruh total langsung dan tidak langsung secara positif dan parsial, variabel auditor internal terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik sebesar 38,44 persen. Hasil penelitian ini memberi arti bahwa dalam penegakan tata kelola pemerintah daerah yang baik pada kabupaten/kota Provinsi di Riau dapat dilakukan oleh auditor internal.

Tabel 2
Besarnya Pengaruh Auditor Internal (X_1) Secara Parsial terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik (Y)

No	Pengaruh	Besar Pengaruh
1	Pengaruh langsung X_1 terhadap Y	24,90 %
2	Pengaruh tidak langsung melalui X_2	10,12 %
	Pengaruh tidak langsung melalui X_3	3,42 %
	Total Pengaruh tidak langsung	13,54 %
3	Total pengaruh X_1 terhadap Y	38,44 %

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah)

Pengaruh Auditor Eksternal secara Parsial Terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik

Tabel 3
Besarnya Pengaruh Auditor Eksternal (X_2) Secara Parsial terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik (Y)

No	Pengaruh	Besar Pengaruh
1	Pengaruh langsung X_2 terhadap Y	14,08 %
2	Pengaruh tidak langsung melalui X_1	10,12 %
	Pengaruh tidak langsung melalui X_3	3,52 %
	Total Pengaruh tidak langsung	13,64 %
3	Total pengaruh X_2 terhadap Y	27,72 %

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah)

Hasil yang diperoleh menunjukkan pengaruh langsung auditor eksternal terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik sebesar 14,08 persen dan pengaruh tidak langsung melalui variabel auditor internal sebesar 10,12 persen, melalui variabel DPRD sebesar adalah 3,52 persen. Jadi dapat diketahui auditor eksternal mempengaruhi tata kelola pemerintah daerah yang baik secara parsial sebesar 27,72 persen. Ini berarti bahwa auditor eksternal berpengaruh secara positif dan parsial terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik pada provinsi dan 9 kabupaten/kota di Riau.

Pengaruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Parsial Terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik

Hasil yang diperoleh menunjukkan pengaruh langsung anggota DPRD terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik sebesar 3,73 persen. Pengaruh

tidak langsung melalui X_1 3,42 persen dan melalui X_2 3,52 persen, dengan total pengaruh tidak langsung 6,94 persen. Besarnya pengaruh DPRD secara parsial terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik, secara langsung atau tidak langsung sebesar 10,66 persen.

Tabel 4
Besarnya Pengaruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (X_3) Secara Parsial Terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik (Y)

No	Pengaruh	Besar Pengaruh
1	Pengaruh langsung X_3 terhadap Y	3,73 %
2	Pengaruh tidak langsung melalui X_1	3,42 %
	Pengaruh tidak langsung melalui X_2	3,52 %
	Total Pengaruh tidak langsung	6,94 %
3	Total pengaruh X_3 terhadap Y	10,66 %

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Terdapat pengaruh auditor internal, auditor eksternal dan DPRD secara serempak/bersama-sama terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik pada kabupaten/kota di Provinsi Riau.
- 2) Sedangkan secara parsial ketiga variabel penelitian ini yaitu auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD berpengaruh lemah terhadap tata kelola pemerintah daerah yang baik pada kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Atas dasar analisis dan kesimpulan yang dibuat dapat disaran hal sebagai berikut ;

- 1) Auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD yang berada di provinsi dan 9 kabupaten/kota di Riau harus didorong untuk dapat meningkatkan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan standar perilaku (kode etik) dan standar pekerjaan yang telah ditentukan.
- 2) Bagi peneliti (akademisi, praktisi) dan pihak-pihak lain yang tertarik melakukan penelitian dengan topik terkait dengan peneliti lakukan, dapat menggali faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tata kelola pemerintah daerah yang baik di pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro Tjokroamidjojo. 2000. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. UI-Press.
- BPK-RI. 2006. *Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 11 tahun 2006 atas Belanj.investigasi.Pemeriksaan on Call. dan pada Provinsi Riau Tahun Anggaran 2005 dan 2006*. BPK- Perwakilan Riau. di Pekanbaru.
- _____.2006. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta

Pengaruh Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penegakkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik (Taufeni Taufik)

- _____.2007. *Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1 tahun 2007 atas Laporan Keuangan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 di Pekanbaru*. BPK- Perwakilan Riau. di Pekanbaru.
- _____.2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. NO. 02 Tahun 2007 tentang *Kode Etik BPK RI*. Jakarta.
- Cheung. Tang Chi. Qiang. Chen. 1997. *Internal audit at Guangdong Nuclear Power Joint Venture Company Limited*. Managerial Auditing Journal. Bradford : Vol. 12. Iss. 4/5 ; pg 219
- Efrizal Syofyan. 2006. *Pengaruh Peran Komite Audit, Direksi dan Auditor Internal terhadap Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance. Survei pada Bank dan Perusahaan Asuransi tercatat di PT.BEJ*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Bandung.
- Gandhi. 2003. *Pengaruh Pemeriksaan Intern, Pemeriksaan Ekstern dan Penilaian DPR terhadap Akuntabilitas Keuangan Departemen (suatu survey pada Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPK, DPR dan Departemen)*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Bandung
- Gusnardi. 2008. *Pengaruh Peran Komite Audit, Internal Control dan Internal Audit dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pencegahan Fraud (Studi pada BUMN terbuka di Indonesia)*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Bandung.
- H.A.Rodi Kartamulja. 2005. *Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Intern dan Audit Intern terhadap Good Corporate Governance (Survey pada Industri Manufaktur Go Publik di Bursa Efek Jakarta)* Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Bandung.
- Jenny Goodwin. Jean Lin Seow. 2002. *The influence of corporate governance mechanisms on the quality of financial reporting and auditing ; perceptions of auditors and directors in Singapore*. Accounting and Finance. Clayton. Nov. Vol. 42. Iss. 3 ; pg 195.
- Jenny Goodwin-Stewart. Pamela Kent. 2006. *The use of internal audit by Australian Companies*. Managerial auditing Journal. Bradford. vol. 21. Iss. ½ ; pg 81.
- Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. The Institute Of Internal Auditors. Forum Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD. Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor. Jakarta : Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas Dan Good Governance. Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Yakarta : Penerbit LAN.
- Transparency International Indonesia. 2006. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, Survei Di Antara Di 32 Wilayah Indonesia*.